

Implementasi Koperasi Merah Putih di Kelurahan Gandul : Analisis Komunikasi Kebijakan Antara Pemerintah Kelurahan dan Masyarakat

Arya Dzaky Baihaqi¹, Anisa Choirin NM², Arya Wahyu Pratama³,
Rulinawaty⁴

^{1,2,3,4} Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

Email: dzakybaihaqi09@gmail.com¹, ririn041708@gmail.com², pratamaarya27402@gmail.com³,
ecampus@ut.ac.id⁴

Article Info

Article history:

Received December 25, 2025
Revised January 04, 2026
Accepted January 06, 2026

Keywords:

Koperasi Merah Putih, Policy
Communication, Gandul
Subdistrict.

ABSTRACT

The policy to establish Koperasi Merah Putih represents a strategic government initiative to strengthen the economic self-reliance of village and urban community (kelurahan) residents through a cooperative business model based on mutual cooperation. However, at the level of local implementation, this policy faces serious challenges, particularly during the pre-implementation phase related to policy communication and community engagement. This research is important because failure at the initial stage of implementation risks reducing the cooperative to a merely administrative entity without tangible economic activities. This study aims to analyze policy communication in the implementation of Koperasi Merah Putih in Gandul Subdistrict. The research employs a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews with policy actors directly involved in the cooperative's establishment process. The data are analyzed to identify gaps between policy socialization, community understanding, and the institutional readiness of the cooperative. The findings reveal a significant gap between policy ambitions at the central level and the realities of community understanding at the subdistrict level. A predominantly top-down and instructive pattern of policy communication leads to message distortion, low community participation, and a weak sense of ownership of the cooperative. Furthermore, unclear role distribution and low job satisfaction among cooperative managers negatively affect public trust and slow down the cooperative's operational processes. These conditions reinforce the public perception that the cooperative is a government project rather than a collective instrument for economic empowerment. This study concludes that the success of Koperasi Merah Putih is highly dependent on transforming policy communication toward a more dialogical and participatory approach. Therefore, it is recommended that the subdistrict government strengthen two-way communication strategies, enhance the capacity and job satisfaction of cooperative managers, and integrate digital literacy as part of efforts to build transparency and public trust.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received December 25, 2025
Revised January 04, 2026
Accepted January 06, 2026

ABSTRACT

Kebijakan pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan upaya strategis pemerintah untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat desa dan kelurahan melalui model usaha berbasis gotong royong. Namun, pada tataran implementasi lokal, kebijakan ini menghadapi tantangan serius, terutama pada fase pra-implementasi

Keywords:

Koperasi Merah Putih,
Komunikasi Kebijakan,
Kelurahan Gandul.

yang berkaitan dengan komunikasi kebijakan dan keterlibatan masyarakat. Penelitian ini menjadi penting karena kegagalan pada tahap awal implementasi berpotensi menjadikan koperasi hanya sebagai entitas administratif tanpa aktivitas ekonomi yang nyata. Penelitian ini bertujuan menganalisis komunikasi kebijakan dalam implementasi Koperasi Merah Putih di Kelurahan Gandul. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terhadap aktor kebijakan yang terlibat langsung dalam proses pembentukan koperasi. Data dikaji untuk melihat kesenjangan antara sosialisasi kebijakan, pemahaman masyarakat, dan kesiapan kelembagaan koperasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya jurang antara ambisi kebijakan di tingkat pusat dan realitas pemahaman masyarakat di tingkat kelurahan. Pola komunikasi kebijakan yang cenderung top-down dan instruktif menyebabkan distorsi pesan, rendahnya partisipasi masyarakat, serta lemahnya rasa kepemilikan terhadap koperasi. Selain itu, ketidakjelasan peran dan rendahnya kepuasan kerja pengurus berdampak pada menurunnya kepercayaan publik dan lambatnya proses operasional koperasi. Kondisi ini memperkuat persepsi masyarakat bahwa koperasi merupakan proyek pemerintah, bukan instrumen pemberdayaan ekonomi bersama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan Koperasi Merah Putih sangat ditentukan oleh transformasi komunikasi kebijakan menuju pendekatan yang dialogis dan partisipatif. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah kelurahan memperkuat strategi komunikasi dua arah, meningkatkan kapasitas dan kepuasan kerja pengurus, serta mengintegrasikan literasi digital sebagai bagian dari upaya membangun transparansi dan kepercayaan masyarakat.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.

**Corresponding Author:**

Arya Dzaky Baihaqi
Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia
E-mail: dzakybaihaqi09@gmail.com

PENDAHULUAN

Koperasi sudah ada dari zaman pasca-kemerdekaan. Bapak Koperasi Indonesia sendiri adalah Wakil Presiden pertama, yaitu Muhammad Hatta dilantik pada kongres Koperasi II bertempat di Bandung 17 Juli 1953. Bung Hatta menganggap koperasi sebagai fondasi utama dalam menopang ekonomi masyarakat Indonesia. Idealnya, koperasi diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan juga memperkuat perekonomian masyarakat sekitar yang dibangun atas asas gotong royong (Megasyara et al., 2025).

Koperasi adalah sebuah sistem yang dirancang terdiri dari beberapa bagian yang saling berkaitan dan saling kerjasama dalam mencapai tujuan, tujuan utama dari koperasi adalah sektor ekonomi mensejahterakan masyarakat sekitar dan tidak lupa mencari profit/keuntungan (Maryam, 2025). Regulasi yang mengatur koperasi dimulai dari Undang-Undang (UU) No.25 Tahun 1992 mengatur tentang prinsip yang digunakan koperasi seperti gotong royong, keanggotaan sukarela, sistem pengelolaan demokratis, transparan, dan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) secara adil. Kemudian adanya revisi perubahan UU No.25 Tahun 1992 pada tahun 2023 menyesuaikan dengan zaman. Revisi UU No.25 Tahun 1992 menambahkan prinsip peran koperasi simpan pinjam. Selanjutnya diterbitkan Peraturan Menteri Koperasi (Permenkop) No. 2 Tahun 2024 yang mengharuskan koperasi mempunyai standar akuntansi

mulai tahun 2025. Dan pada tahun 2025 berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2025 yang menjadi pembuka jalan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.



Gambar 1. Presiden Prabowo Meluncurkan 80.081 Koperasi Merah Putih

Sumber Gambar : kemenkeu.go.id

Pada tanggal 21 Juli 2025 bertempat di Kabupaten Klaten Jawa Tengah, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meluncurkan kelembagaan 80.081 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP). Tujuan utama dari pembentukan Koperasi Merah Putih adalah untuk memperkuat pendapatan dan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat Desa/Kelurahan dengan usaha bersama yang berbasis gotong royong dan kekeluargaan. Sehingga koperasi ini diharapkan bisa menjadi fondasi dalam pembangunan ekonomi serta dapat mencapai kemandirian ekonomi di tingkat Desa/Kelurahan. Selaku badan yang berpedoman pada asas gotong royong dan kebersamaan, Koperasi Merah Putih ini diharapkan mampu untuk meminimalisir kesenjangan taraf hidup masyarakat di Desa/Kelurahan (Raenaldi, 2025).

Program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) melibatkan berbagai macam instansi pusat mulai dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenkopUKM) sebagai pimpinan koordinasi nasional, modul pembentukan, sosialisasi, bertanggung jawab atas pembentukan, pelatihan dan pendampingan SDM melalui Satgas Percepatan Pembentukan KDKMP (Kopdes Merah Putih, 2025), kemudian beberapa kementerian terkait seperti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai penyedia regulasi seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2025 dalam dukungan bupati/walikota dalam pendanaan Koperasi Kelurahan Merah Putih, koordinasi dengan pemerintah daerah, sistem pengawasan administratif dan logistik dalam pembentukan koperasi (Kementerian Dalam Negeri, 2025). Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dilansir dari (Kementerian Desa PDTT, 2025) mempunyai peran memfasilitasi desa dalam inventarisasi potensi, melakukan sosialisasi, pendampingan, pemantauan evaluasi program. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai bendahara keuangan negara menyediakan skema pembiayaan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.49 Tahun 2025 (pinjaman senilai 3 miliar dari bank Himbara dengan Bunga 6%, tenor 6 tahun), penjaminan dana, dan penyesuaian dengan nilai anggaran APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) (Nadhilah Bunga Foureska, 2025).

Kemudian di tingkat daerah, pemerintah daerah yang punya kewenangan dalam pembangunan ekonomi dalam mengalokasikan anggaran, lahan, dan sumber daya yang lain dalam memperdayakan masyarakatnya. Peran pemerintah daerah dalam konteks program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai fasilitator utama perpanjangan tangan pemerintah pusat melalui akses modal usaha mikro, pendampingan komunitas, alokasi

anggaran daerah dan lahan mendirikan koperasi, pelatihan manajemen koperasi, sinergi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan tujuan koperasi ini dapat memberdayakan masyarakat di tingkat desa/kelurahan melalui produksi UMKM local menciptakan masyarakat yang mandiri secara ekonomi dan menghilangkan budaya ketergantungan bantuan (Rulinawaty, 2018).

Keberhasilan implementasi kebijakan Koperasi Merah Putih ini tidak hanya dilihat oleh desain dari program dan regulasinya saja, tetapi juga dapat dilihat dari cara aktor pelaksana mengkomunikasikan kebijakan ini kepada kelompok sasaran. Komunikasi kebijakan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa masyarakat sudah memahami maksud, cara kerja, dan keuntungan dari kebijakan tersebut. Apabila komunikasi tidak berjalan dengan lancar, masyarakat mungkin akan sulit untuk mengetahui, mengerti, atau menanggapi suatu kebijakan, sehingga dapat mengakibatkan kegagalan pada implementasinya.

Di Kelurahan Gandul, kebijakan pembentukan Koperasi Merah Putih telah diperkenalkan sebagai salah satu upaya penguatan ekonomi masyarakat setempat. Pemerintah kelurahan telah melakukan sosialisasi awal mengenai keberadaan dan tujuan Koperasi Merah Putih kepada masyarakat. Namun demikian, hingga saat ini koperasi tersebut belum dapat direalisasikan secara operasional. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara proses sosialisasi kebijakan dengan tahap implementasi di tingkat kelurahan, sehingga manfaat kebijakan tersebut belum dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komunikasi kebijakan dalam implementasi Koperasi Merah Putih di Kelurahan Gandul dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini memanfaatkan interaksi langsung dengan narasumber sebagai sumber data utama, untuk menggali pandangan para aktor kebijakan terhadap Koperasi Merah Putih dan menganalisis kesenjangan komunikasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam kajian komunikasi kebijakan pada fase pra-implementasi suatu kebijakan, serta menjadi masukan praktis bagi pemerintah kelurahan dalam merencanakan strategi kebijakan koperasi yang lebih efektif dan partisipatif.

TINJAUAN PUSTAKA

Perkembangan Koperasi di Indonesia telah menjadi bagian integral dari ekonomi Indonesia, dimulai sejak pasca-kemerdekaan. Dalam Konferensi Koperasi II yang diselenggarakan pada tahun 1953, Muhammad Hatta menegaskan pentingnya koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat. Ia menganggap koperasi sebagai sebuah sistem yang tidak hanya berorientasi pada profit tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat dan pengurangan kesenjangan sosio-ekonomi. Menurut Dinas Koperasi dan UKM, koperasi diharapkan mampu memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi anggotanya serta berkontribusi terhadap ketahanan ekonomi lokal.

Marwah Koperasi dalam Ekonomi Kerakyatan Indonesia bukan sekadar entitas bisnis biasa, melainkan cerminan dari identitas ekonomi bangsa yang berlandaskan asas kekeluargaan. Mohammad Hatta, sebagai peletak dasar pemikiran koperasi di tanah air, menegaskan bahwa koperasi harus menjadi fondasi utama yang menopang hidup orang banyak (Megasyara et al., 2025). Secara hukum, perjalanan koperasi diperkuat melalui UU No. 25 Tahun 1992 yang kemudian diperbarui dalam semangat UU P2SK tahun 2023. Inti dari regulasi ini adalah untuk memastikan bahwa koperasi tetap memegang prinsip gotong royong. Prinsip gotong royong yang menjadi dasar koperasi mencerminkan nilai-nilai sosial dan kekeluargaan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi tetapi juga sebagai platform bagi masyarakat untuk berkolaborasi dalam memecahkan masalah-masalah sosial yang

dihadapi. Transparansi dalam pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU), dan pengelolaan yang demokratis. Koperasi diharapkan tidak hanya mengejar profit, tetapi juga menjadi alat distribusi kesejahteraan yang adil bagi seluruh anggotanya (Maryam, 2025).

Secara filosofis, Koperasi Merah Putih mengadopsi nilai spiritual yang tertuang dalam Al-Qur'an (Q.S. Al-Ma'idah: 2) tentang tolong-menolong dalam kebaikan, yang kemudian diejawantahkan dalam budaya gotong royong nasional. Perbedaan mendasar koperasi ini dengan koperasi konvensional terletak pada integrasi teknologi digital dan penguatan kapasitas SDM pengurusnya. Koperasi ini diharapkan menjadi "mesin" penggerak ekonomi desa yang mampu memutus rantai ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman ilegal atau tengkulak, dengan cara memberikan akses modal dan pasar yang lebih transparan bagi warga desa melalui platform digital yang terpusat.

1. Komunikasi Kebijakan: Jembatan Antara Program dan Penerimaan Masyarakat

Keberhasilan sebuah kebijakan publik sering kali tidak ditentukan oleh seberapa bagus konsepnya di atas kertas, melainkan oleh seberapa efektif kebijakan tersebut dikomunikasikan kepada pelaksana dan masyarakat. Dalam teori implementasi, komunikasi memegang peran sebagai transmisi informasi. Menurut (Struktur et al., 2017), ada tiga indikator penting dalam komunikasi kebijakan: transmisi (penyaluran pesan), kejelasan (pesan tidak bermakna ganda), dan konsistensi. Di tingkat Kelurahan, komunikasi kebijakan antara pemerintah lokal dan warga sering kali menghadapi tantangan berupa distorsi informasi. Jika sosialisasi mengenai Koperasi Merah Putih dilakukan secara searah tanpa ruang dialog, maka akan muncul ketidakpahaman di masyarakat yang berujung pada rendahnya partisipasi. Oleh karena itu, komunikasi kebijakan harus dipandang sebagai proses dialogis untuk membangun kepercayaan publik. Komunikasi kebijakan merupakan aspek krusial dalam implementasi setiap program pemerintah. Teori komunikasi kebijakan menjelaskan bahwa kebijakan yang baik tidak hanya berlandaskan pada desain yang kokoh tetapi juga memerlukan strategi sosialisasi yang efektif untuk memastikan masyarakat memahami dan menerima kebijakan tersebut. Menurut penelitian oleh (Kusuma et al., 2024), komunikasi dua arah dalam kebijakan Koperasi Merah Putih adalah strategi dialogis transparan yang mengubah pola top-down menjadi partisipatif untuk membangun kepercayaan dan rasa memiliki (sense of belonging) masyarakat. Warga diposisikan sebagai subjek aktif guna mengatasi skeptisisme dan memastikan koperasi menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang nyata, bukan sekadar proyek administratif.

2. Dinamika Sikap dan Kepuasan Kerja (Teori Stephen P. Robbins)

Mengapa banyak koperasi di masa lalu berakhir sebagai "koperasi papan nama"? Jawabannya sering kali terletak pada manusianya. (*Perilaku-Organisasi-2-Edisi-11.Pdf*, n.d.) dalam studinya tentang perilaku organisasi menekankan bahwa sikap dan kepuasan kerja adalah mesin utama kinerja. Dalam konteks Koperasi Merah Putih, para pengurus adalah wajah dari kebijakan tersebut. Jika pengurus merasa puas, karena adanya kejelasan tugas, dukungan kepemimpinan dari lurah atau tokoh masyarakat, serta sistem penghargaan yang adil maka mereka akan bekerja dengan sikap positif. Sebaliknya, jika pengurus merasa terbebani atau tidak dihargai, mereka akan melayani anggota dengan setengah hati, yang pada akhirnya akan meruntuhkan kepercayaan warga. Robbins mengingatkan kita bahwa kepuasan kerja berbanding lurus dengan loyalitas; pengurus yang puas akan melahirkan anggota yang setia. Sebagai Penggerak Layanan mengacu pada pemikiran Stephen P. Robbins, perilaku organisasi sangat dipengaruhi oleh sikap dan kepuasan kerja individu di dalamnya. Dalam konteks pengelolaan Koperasi Merah Putih, pengurus koperasi adalah ujung tombak pelayanan. Kepuasan kerja lahir dari beberapa faktor kunci, yaitu pekerjaan yang menantang namun tetap terukur, sistem penggajian atau penghargaan yang adil, kondisi kerja yang

mendukung, serta rekan kerja yang kooperatif. Jika para pengurus Koperasi Merah Putih merasa puas dan memiliki sikap kerja yang positif, hal ini secara otomatis akan meningkatkan kualitas pelayanan mereka kepada anggota koperasi. Penguatan SDM bukan hanya soal pelatihan teknis, tapi juga soal bagaimana membangun mentalitas dan kepuasan batin pengurus dalam mengelola aset masyarakat.

3. Advokasi Kebijakan dan Partisipasi Masyarakat Desa

Advokasi kebijakan dalam pembentukan Koperasi Merah Putih berfungsi untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak bersifat "*top-down*" atau sekadar perintah dari atas. Advokasi di tingkat kelurahan bertujuan agar masyarakat merasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap koperasi tersebut. Partisipasi masyarakat bukan hanya soal hadir dalam rapat desa, tetapi soal ikut menentukan arah usaha koperasi. Dalam era digital, advokasi ini juga menyentuh aspek literasi. Masyarakat harus diedukasi bahwa sistem digital yang akan diterapkan pada tahun 2026 bukanlah alat untuk memantau mereka, melainkan instrumen transparansi agar iuran mereka aman. Tanpa advokasi yang kuat, Koperasi Merah Putih hanya akan dianggap sebagai beban administratif baru bagi warga desa, bukannya sebuah solusi ekonomi.

4. Implementasi Koperasi Merah Putih

Koperasi Merah Putih di Kelurahan Gandul adalah salah satu upaya pemerintah untuk memperkuat perekonomian lokal melalui model koperasi berbasis gotong royong. Meskipun kebijakan telah diperkenalkan melalui sosialisasi awal oleh pemerintah kelurahan, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Sejauh ini, koperasi tersebut belum dapat berjalan secara operasional, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara sosialisasi dan implementasi yang terjadi di tingkat masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi ini termasuk pemahaman yang kurang tentang manfaat koperasi di kalangan masyarakat dan ketidakcukupan infrastruktur serta sumber daya yang mendukung. Untuk itu, penting bagi pemerintah untuk memperkuat komunikasi dengan masyarakat agar mereka lebih memahami dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan koperasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis proses komunikasi kebijakan dalam implementasi Koperasi Merah Putih di Kelurahan Gandul. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami secara mendalam pandangan, pemahaman, serta pengalaman aktor kebijakan terkait sosialisasi dan pelaksanaan koperasi di tingkat kelurahan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan salah satu aktor yang terlibat langsung dalam Koperasi Merah Putih, yang direkam dalam bentuk podcast video dan dipublikasikan secara daring. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu menggambarkan secara komprehensif kesenjangan antara sosialisasi kebijakan dan implementasi Koperasi Merah Putih di Kelurahan Gandul.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis mendalam terhadap dinamika implementasi Koperasi Merah Putih di Kelurahan Gandul, ditemukan :

1. Fakta bahwa terdapat jurang pemisah yang cukup lebar antara ambisi besar pemerintah pusat dengan realitas pemahaman masyarakat di tingkat akar rumput. Meskipun target nasional pembentukan 80.000 unit koperasi pada tahun 2025 dirancang untuk memicu ledakan ekonomi desa, namun di lapangan, warga Gandul terlihat masih dibayangi oleh skeptisisme kolektif akibat pengalaman pahit terhadap koperasi-koperasi masa

lalu yang sering kali hanya berakhir sebagai "papan nama" tanpa manfaat ekonomi yang konkret (Turi & Muharram, 2023).

2. Kondisi ini diperburuk oleh pola komunikasi kebijakan dari pemerintah kelurahan yang cenderung masih bersifat searah dan instruktif, sehingga transmisi pesan mengenai esensi gotong royong modern ini sering kali terdistorsi dan hanya dianggap sebagai proyek pemerintah tahunan semata. Jika dilihat dari sisi internal pengelola menggunakan kerangka berpikir Stephen Robbins, terlihat jelas bahwa kepuasan kerja adalah mata rantai yang hilang, yaitu para calon pengurus masih terjebak dalam ketidakjelasan peran dan kurangnya dukungan kepemimpinan yang bersifat suportif, yang pada akhirnya melahirkan sikap kerja yang pasif dan kurang bergairah.
3. Mentalitas pengurus yang merasa terbebani secara administratif ini secara otomatis menurunkan kualitas pelayanan kepada warga, yang menjadi alasan utama mengapa angka kepercayaan anggota masih sulit untuk ditingkatkan. Padahal, visi digitalisasi total yang direncanakan pada tahun 2026 menuntut kolaborasi Pentahelix yang sangat solid, di mana komunitas tidak boleh hanya diposisikan sebagai objek teknologi tetapi harus dilibatkan sebagai subjek yang mengawasi transparansi sistem (Tinggi & Trisakti, 2021).
4. Oleh karena itu, kunci sukses agar Koperasi Merah Putih di Gandul tidak menjadi artefak birokrasi yang "mati suri" terletak pada keberanian pemerintah lokal untuk mengubah gaya komunikasinya menjadi lebih membumi, memastikan penguatan SDM dilakukan melalui perbaikan kontrak psikologis pengurus, dan membuktikan bahwa teknologi digital yang diusung adalah alat untuk menjaga kejujuran pengelolaan dana warga demi mencapai kemandirian ekonomi yang berkelanjutan di masa depan.
5. Kesenjangan komunikasi ini mencerminkan pola top-down yang mendistorsi esensi gotong royong, di mana masyarakat tidak terlibat dialogis sehingga kepercayaan rendah dan kemandirian ekonomi sulit tercapai. Faktor internal seperti mentalitas pengurus yang terbebani administratif memperburuk pelayanan, sementara advokasi lemah membuat warga enggan berkontribusi, kontras dengan prinsip UU No. 25/1992 dan Inpres No. 9/2025. Perbaikan memerlukan komunikasi dua arah, pelatihan SDM berbasis kepuasan kerja, dan literasi digital untuk membuktikan transparansi.
6. Komunikasi Koperasi Merah Putih di Gandul dimulai dari sosialisasi awal oleh pemerintah kelurahan pasca-Inpres No. 9/2025, tapi terbatas pada penyampaian tujuan ekonomi gotong royong tanpa ruang dialog, menyebabkan distorsi pesan dan skeptisisme masyarakat. Proses ini gagal membangun sense of belonging karena instruktif, bukan partisipatif, dengan pengurus sebagai ujung tombak yang lemah akibat ketidakjelasan tugas, sehingga visi digital 2026 belum terealisasi. Secara holistik, komunikasi ini pra-implementasi: ambisius secara regulasi tapi lemah di lapangan, memerlukan transformasi ke model dialogis Pentahelix untuk keberlanjutan.

Kondisi pra-implementasi yang berlangsung di Kelurahan Gandul menggambarkan bahwa Koperasi Merah Putih belum sepenuhnya berubah dari kebijakan normatif menjadi praktik ekonomi yang bersumber pada kehidupan sosial masyarakat. Kebijakan ini masih dipandang sebagai agenda struktural dari pemerintah pusat yang "turun" ke tingkat kelurahan, sehingga relasi antara kebijakan dan masyarakat belum bersifat alami. Dalam situasi seperti saat ini, koperasi belum mampu berfungsi sebagai ruang kolektif yang menyatukan kepentingan ekonomi masyarakat, melainkan masih dipersepsikan sebagai proyek

administratif yang keberhasilannya diukur dari terbentuknya struktur, bukan dari aktivitas ekonomi yang nyata.

Minimnya keterlibatan masyarakat dalam tahap awal pembentukan koperasi menunjukkan bahwa proses komunikasi kebijakan belum mampu membangun kesadaran kritis warga terhadap posisi mereka sebagai pemilik sekaligus pengelola koperasi. Masyarakat belum melihat koperasi sebagai perpanjangan dari kebutuhan ekonomi mereka sendiri, melainkan sebagai entitas eksternal yang membutuhkan kepatuhan administratif. Hal ini memperkuat argumen bahwa kegagalan implementasi kebijakan sering kali bukan disebabkan oleh penolakan terbuka, melainkan oleh absennya keterlibatan bermakna (*meaningful participation*) dari kelompok sasaran kebijakan.

Di Kelurahan Gandul, komunikasi kebijakan yang bersifat informatif dan instruktif tidak cukup untuk menjawab kompleksitas pengalaman historis masyarakat terhadap koperasi. Trauma kolektif akibat kegagalan koperasi di masa lalu menciptakan sikap kehati-hatian yang tinggi di kalangan warga. Tanpa ruang dialog yang memungkinkan masyarakat menyampaikan keraguan, kritik, dan ekspektasi mereka, komunikasi kebijakan justru memperkuat jarak psikologis antara pemerintah kelurahan dan masyarakat. Kebijakan koperasi kemudian kehilangan dimensi persuasifnya dan hanya berfungsi sebagai narasi formal yang sulit diterjemahkan ke dalam tindakan kolektif.

Kelemahan komunikasi kebijakan ini juga berdampak langsung pada proses penguasaan nilai-nilai koperasi dalam kalangan pengurus. Ketidaktepatan mandat, peran, dan arah pengembangan koperasi menciptakan kondisi kerja yang tidak kondusif bagi terbentuknya sikap profesional dan berorientasi pelayanan. Pengurus koperasi belum sepenuhnya memaknai perannya sebagai agen perubahan ekonomi lokal, melainkan sebagai pelaksana tugas administratif yang bersifat sementara. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pembentukan kelembagaan koperasi tanpa penguatan aspek psikologis dan organisasional berpotensi menghasilkan struktur yang rapuh dan mudah mengalami stagnasi.

Dalam perspektif perilaku organisasi, situasi tersebut mengindikasikan rendahnya tingkat kepuasan kerja dan komitmen pengurus terhadap koperasi. Menurut (Rulinawaty et al., 2019) Kepuasan atas kinerja atau capaian kerja secara individu itu akan meningkatkan komitmen terhadap organisasi. Ketika pengurus tidak memiliki kejelasan tujuan dan dukungan kepemimpinan yang memadai, sikap kerja yang muncul cenderung defensif dan minimalis. Dampaknya, kualitas interaksi antara pengurus dan masyarakat menjadi rendah, sehingga koperasi gagal membangun citra sebagai lembaga ekonomi yang responsif dan dapat dipercaya. Kepercayaan publik yang seharusnya menjadi fondasi utama koperasi justru tidak terbentuk secara optimal.

Selain itu, lemahnya advokasi kebijakan di tingkat kelurahan menyebabkan masyarakat tidak memperoleh pemahaman yang utuh mengenai arah jangka panjang Koperasi Merah Putih. Advokasi seharusnya berfungsi sebagai proses edukatif yang menjelaskan posisi koperasi dalam ekosistem ekonomi lokal, termasuk potensi manfaat, risiko, serta mekanisme pengawasan yang dapat dilakukan oleh anggota. Tanpa advokasi yang berkelanjutan, koperasi berisiko dipersepsikan sebagai beban baru yang menambah kewajiban warga, bukan sebagai instrumen kolektif untuk memperkuat kemandirian ekonomi.

Rencana digitalisasi koperasi yang dicanangkan untuk tahun 2026 semakin menegaskan pentingnya komunikasi kebijakan yang inklusif dan berorientasi literasi. Teknologi digital dalam koperasi tidak dapat dilepaskan dari dimensi kepercayaan, karena menyangkut pengelolaan data, keuangan, dan transparansi organisasi (Koordinator et al., 2025). Apabila digitalisasi diperkenalkan tanpa pendampingan dan dialog yang memadai, masyarakat berpotensi memandang teknologi sebagai alat kontrol birokratis, bukan sebagai sarana pemberdayaan. Oleh karena itu, digitalisasi harus dipahami sebagai bagian dari strategi

komunikasi kebijakan yang menempatkan masyarakat sebagai aktor pengawas sekaligus pengguna sistem.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Koperasi Merah Putih di Kelurahan Gandul menghadapi tantangan struktural dan kultural yang saling berkaitan. Tantangan struktural tercermin dari dominasi pendekatan top-down dalam komunikasi kebijakan, sementara tantangan kultural terlihat dari rendahnya kepercayaan dan partisipasi masyarakat akibat pengalaman historis dan minimnya dialog. Kedua tantangan ini tidak dapat diselesaikan hanya melalui percepatan pembentukan kelembagaan, tetapi memerlukan transformasi cara pemerintah kelurahan membangun relasi dengan masyarakat.

Dengan demikian, Koperasi Merah Putih di Kelurahan Gandul saat ini berada pada titik kritis antara menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi atau sekadar artefak kebijakan yang berhenti pada tataran simbolik. Masa depan koperasi sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah kelurahan untuk menggeser pendekatan komunikasi kebijakan menuju pola yang lebih dialogis, partisipatif, dan berorientasi pada pembangunan kepercayaan. Tanpa perubahan mendasar pada aspek komunikasi dan penguatan sumber daya manusia, koperasi berpotensi kehilangan momentum dan gagal menjalankan peran strategisnya dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat kelurahan secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan utama dalam implementasi Koperasi Merah Putih di Kelurahan Gandul tidak terletak pada kekosongan kebijakan atau lemahnya kerangka regulasi, tetapi pada belum optimalnya komunikasi kebijakan dalam menghubungkan kepentingan pemerintah kelurahan dengan masyarakat. Kebijakan koperasi telah hadir secara formal, namun belum sepenuhnya terinternalisasi sebagai praktik ekonomi kolektif yang dapat dipahami, diterima, dan dimiliki oleh warga Kelurahan Gandul.

Kesenjangan komunikasi yang bersifat top-down dan instruktif ini menyebabkan masyarakat belum terlibat secara berharga dalam proses pra-implementasi koperasi. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kepercayaan publik, lemahnya rasa kepemilikan (*sense of belonging*), serta kentatnya persepsi masyarakat bahwa koperasi merupakan proyek administratif pemerintah, bukan instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Di sisi internal, ketidakjelasan peran dan minimnya dukungan kepemimpinan turut memengaruhi sikap dan kepuasan kerja pengurus, yang pada akhirnya menurunkan kualitas pelayanan dan memperlambat proses operasional koperasi.

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan Koperasi Merah Putih sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah kelurahan dalam mengelola komunikasi kebijakan secara dialogis dan partisipatif. Transformasi pendekatan komunikasi menjadi prasyarat utama agar koperasi tidak berhenti pada tahap simbolik, melainkan mampu berkembang sebagai lembaga ekonomi yang berkelanjutan. Tanpa perbaikan pada aspek komunikasi, penguatan sumber daya manusia, dan literasi masyarakat, termasuk dalam rencana digitalisasi bahwa koperasi berisiko kehilangan momentum dan gagal menjalankan fungsi strategisnya dalam membangun kemandirian ekonomi di tingkat kelurahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementrian Dalam Negeri. (2025). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Dukungan Bupati/Wali Kota Dalam Pendanaan Koperasi Kelurahan Merah Putih*. 1–15.
- Kementrian Desa PDTT. (2025). *Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Percepatan Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih*.
- Koordinator, K., Perekonomian, B., Indonesia, R., & Pers, S. (2025). *Peta Jalan Indonesia Digital untuk Mendukung Generasi Muda Menjadi Game Changer di Era Digital*.

- Kopdes Merah Putih. (2025). *Koperasi Merah Putih*. 2025.
- Kusuma, D. A., Yendra, M., Bakhtiar, R., & Takdir, M. (2024). *Ekasakti Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Pengaruh Media Sosial Terhadap Pola Komunikasi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Era Digital*. 5(1), 23–32.
- Maryam, R. (2025). *Establishment Of The Koperasi Desa Merah Putih As Reviewed JPH Galunggung*. 2(25), 17–37.
- Megasyara, I., Wibowo, R., Febrianti, D., Bait, J. F., Lukman, A., & Megasyara, I. (2025). *Optimalisasi Tata Kelola Keuangan dan Manajemen Operasional Koperasi Merah Putih Menuju Kinerja yang Berkelanjutan*. 6(1), 9–15.
- Nadhilah Bunga Foureska. (2025). *Koperasi Merah Putih: Strategi Pemerintah Bangkitkan Ekonomi Desa Menuju Indonesia Emas 2045*. 2025.
- perilaku-organisasi-2-edisi-11.pdf*. (n.d.).
- Raenaldi, A. (2025). *Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dalam Pengelolaan Koperasi Merah Putih yang Transparan dan Akuntabel di Desa Puro*. 1(4), 915–920.
- Rulinawaty. (2018). *Studi Kasus Program Gernas Kakao di Luwu Utara 1 Oleh : Alwi Rulinawaty Kasmad Abstrak Secara umum upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberdayakan masyarakat adalah adanya kebijakan desentralisasi . Kebijakan ini memberikan peluang yang sangat besar b.*
- Struktur, D. A. N., Terhadap, B., Sabatier, P. A., Meter, V., & Horn, V. (2017). *Implementasi Program Bantuan Operasional Dasar Negeri Di Kecamatan Tambak Mening Subekti , Muslih Faozanudin , Ali Rokhman Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Universitas Jenderal Soedirman* 3, 58–71.
- Susanti, A., Kasmad, R., & Waris, I. (2019). *Mewujudkan Komitmen Organisasi Realize Organizational Commitments*. 1(April), 1–9.
- Tinggi, S., & Trisakti, P. (2021). *Implementasi Konsep Pentahelix Dalam Pengembangan Desa Wisata Cibuntu*. 4(1), 24–31.
- Turi, L. O., & Muharram, A. I. (2023). *Tingkat Kepercayaan Anggota Koperasi*. 2, 3787–3797.